

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK MASYARAKAT: STUDI KASUS KELOMPOK TANI DI DESA LEBUNG LAWE, KECAMATAN BUAY BAHUGA KABUPATEN WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG

Deby Intan Sari¹, Mohamad Firdaus²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka

ARTICLE INFO

Article history:

Received: June 2025

Revised: June 2025

Accepted: June 2025

Available online

Korespondensi: Email:

¹043736389@ecampus.ut.ac.id,

²Mohamadfirdaus11@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

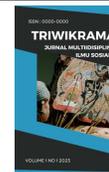
Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis fungsi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani sawit di Desa Lebung Lawe, Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Pemberdayaan diartikan sebagai proses yang bertujuan demi memperkuat kemampuan kelompok yang rentan dalam masyarakat, khususnya individu yang menghadapi kemiskinan. Sebagai sebuah tujuan, pemberdayaan merujuk pada kondisi masyarakat berdaya, memiliki pengetahuan, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa berfungsi sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, juga katalisator demi mendukung pengembangan kelompok tani. Namun, tantangan seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah dan petani serta distribusi bantuan yang tidak merata masih menjadi hambatan signifikan. Infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya bimbingan teknis berkelanjutan juga menghambat efektivitas program pemberdayaan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan, pelatihan intensif bagi petani, dan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemberdayaan kelompok tani sawit dapat lebih efektif dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di desa.

Kata Kunci: Kelompok Tani, Pemberdayaan, Pemerintah Desa.

Abstract

This study aims to analyze the role of the village government in empowering oil palm farmer groups in Lebung Lawe Village, Buay Bahuga District, Way Kanan Regency, Lampung Province. Empowerment is defined as a process aimed at strengthening the power or capacity of marginalized groups in society, particularly individuals experiencing poverty. As a goal, empowerment refers to a state of society that is empowered, knowledgeable, and capable of meeting its own needs. The method used is a qualitative approach, with data collection through interviews, field observations, and document analysis. The results of the study indicate that the village government functions as a regulator, dynamist, facilitator, and catalyst in supporting the development of farmer groups. However, challenges such as a lack of coordination between the government and farmers, as well as uneven distribution of assistance, remain significant obstacles. Inadequate infrastructure and a lack of ongoing technical guidance also hinder the effectiveness of empowerment programs. This study



recommends enhancing coordination among stakeholders, providing intensive training for farmers, and improving infrastructure to increase productivity and community welfare. With these measures, it is hoped that the empowerment of oil palm farmer groups can be more effective and contribute to sustainable economic development in the village.

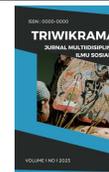
Keywords: Farmer Groups, Empowerment, Village Government.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan kelompok tani sawit di Indonesia merupakan aspek penting dalam pembangunan pertanian berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kelompok tani sawit bukan saja berperan meningkatkan produksi, namun juga berperan menjadi agen perubahan ekonomi yang mendorong pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan pendapatan keluarga petani. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, sektor pertanian, termasuk perkebunan sawit, memberikan kontribusi sebesar 13,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan lebih dari 3 juta petani sawit yang berperan aktif dalam industri ini. Tanaman sawit memiliki potensi hasil panen yang tinggi dan peluang pengembangan luas, khususnya di wilayah yang memiliki kondisi geografis mendukung.

Desa Lebung Lawe, Kecamatan Buay Bahuga, memiliki potensi strategis untuk pengembangan kelompok tani sawit. Dengan topografi berupa dataran rendah dan perbukitan serta curah hujan rata-rata 2.500 mm per tahun, desa ini menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan tanaman sawit. Namun, tantangan seperti risiko banjir dan tanah longsor menjadi kendala bagi stabilitas produksi dan keberlanjutan usaha tani. Mayoritas petani sawit di desa ini merupakan petani kecil dengan lahan 1 hingga 3 hektar yang sangat bergantung pada usaha sawit sebagai sumber penghasilan utama. Meskipun potensi hasil panen menjanjikan, banyak petani masih menghadapi kendala signifikan, antara lain keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian modern, kurangnya pengetahuan tentang praktik budidaya yang baik, serta fluktuasi harga pasar yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan sekitar 60% petani di Desa Lebung Lawe masih tergolong subsisten, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa adanya surplus untuk pengembangan usaha.

Peran pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan terdepan memiliki posisi strategis dalam proses pemberdayaan kelompok tani sawit. Sebagaimana ditegaskan oleh Yunus dan Fadli (2017), "Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani sawit memerlukan dukungan dari pemerintah desa untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program yang dijalankan" (p. 45). Dukungan yang diberikan pemerintah desa meliputi penyediaan sumber daya, pelatihan, serta pengembangan infrastruktur pendukung pertanian. Tambahan dari Irawan dan Sari (2021) menyatakan, "Peran pemerintah desa sangat krusial dalam mendukung pemberdayaan kelompok tani sawit, terutama pada aspek akses terhadap sumber daya dan pelatihan yang diperlukan" (p. 75). Peran tersebut mencakup fasilitasi pelatihan teknik budidaya, penyediaan teknologi pertanian modern, dan penciptaan akses pasar yang lebih luas, demi meningkatkan pendapatan petani. Namun demikian, pelaksanaan fungsi tersebut kerap menemui hambatan. Sebayang, Maweikere, dan Tambas (2024) menilai yakni "kontribusi pemerintah desa dalam memberdayakan kelompok tani masih belum sepenuhnya maksimal, khususnya dalam sosialisasi dan pendampingan" (p. 195). Keterbatasan tenaga ahli, minimnya anggaran khusus pemberdayaan, serta koordinasi belum efektif di antara pemerintah desa serta pihak terkait menjadi persoalan utama. Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menunjukkan bahwa hanya sekitar 40% anggaran desa dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat, selebihnya lebih banyak digunakan untuk bidang infrastruktur dan administrasi. Data dari Kementerian Pertanian juga menjelaskan bahwa peningkatan

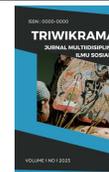


produktivitas sawit dapat naik hingga 20% bila disertai pelatihan dan penggunaan teknologi yang tepat. Bahkan di beberapa daerah, kelompok tani yang mendapat pelatihan dan akses teknologi modern mengalami kenaikan hasil panen hingga 30%, yang berimplikasi pada peningkatan pendapatan mereka secara signifikan.

Adanya nilai-nilai yang dihargai di masyarakat menyebabkan terbentuknya tingkatan kelas sosial, seperti kelas sosial atas (upper class), kelas sosial menengah (middle class), dan kelas sosial bawah (lower class). Kelas-kelas ini merupakan hasil pengelompokan masyarakat secara hierarki vertikal yang dilakukan melalui stratifikasi sosial, yang juga dikenal sebagai lapisan masyarakat. Stratifikasi sosial sendiri berfungsi untuk mengelompokkan individu dan kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Fenomena keberagaman ini mencakup aspek horizontal dan vertikal dalam kehidupan masyarakat yang sangat beragam. Dengan demikian, perbedaan antar individu atau kelompok dalam masyarakat merupakan hal yang sangat wajar terjadi dalam kehidupan sosial. Menurut Mulyana dalam Raintung, dkk. (2021) pada dasarnya, kelompok terdiri dari dua orang atau lebih yang berinteraksi dengan tujuan bersama. Interaksi yang berlangsung di dalam kelompok ini bersifat relatif stabil dan memiliki struktur tertentu.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, menekankan yaitu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di desa bertujuan demi menumbuhkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan warga. Hal ini dicapai Dengan mengacu pada kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai, pelaksanaan dilakukan melalui kebutuhan serta urgensi di lingkungan warga. Menurut Pasal 1 Undang-Undang tersebut, pemerintahan desa adalah pelaksanaan masalah pemerintahan dan kebutuhan masyarakat setempat pada struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang pembentukan pemerintahan desa pada suatu daerah pada dasarnya adalah demi menghadirkan kebutuhan pokok Masyarakat. Pemerintah Desa adalah suatu proses yang mengintegrasikan upaya-upaya masyarakat desa dengan upaya pemerintah, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Pemerintah Nasional, penyelenggaraan Pemerintah Desa difokuskan pada wilayah pedesaan sebagaimana pendapat Surasih yang dikutip oleh Raintung, dkk (2021). Jika menganut pendapat pada teori Arif (Adhawati dalam Raintung, 2021) pemerintah memiliki peran dalam pemberdayaan yaitu : sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator dan Katalistator.

Menurut Suharto dalam Raintung, dkk. (2021), pemberdayaan memiliki dua aspek, yaitu sebagai tahapan juga sebagai tujuan. Sebuah tahapan, peningkatan kapasitas melibatkan sekumpulan aktivitas yang bertujuan demi memperkuat kemampuan juga kapasitas kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat, khususnya individu yang hidup dalam kekurangan. Sebagai sasaran, peningkatan kapasitas merujuk ke kondisi atau tujuan yang ingin diraih melalui transformasi sosial, yakni menciptakan masyarakat yang kuat, memiliki kapasitas, serta memiliki keilmuan jguga keterampilan untuk mencukupi kebutuhan hidup, baik yang bersifat material, finansial, maupun sosial. Ini termasuk mempunyai keyakinan diri, kemampuan untuk mengungkapkan harapan, memiliki sumber penghidupan, ikut serta dalam aktivitas sosial, serta berdiri sendiri dalam menjalankan tanggung jawab kehidupan. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering dijadikan tolak ukur keberhasilan dalam proses pemberdayaan. Proses pemberdayaan bisa dilakukan baik individu ataupun secara bersama. Agar usaha kecil (keluarga) dapat berkembang dan menjadi usaha yang tangguh serta mandiri, dilakukan pembinaan dan pengembangan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat (keluarga). Upaya ini disebut pemberdayaan kegiatan usaha sebagaimana diungkapkan oleh Riza Ismawan dan Budiantoro dalam Suswandi (2022). Keluarga dapat diartikan sebagai unit sosial terkecil yang berfungsi sebagai dasar dalam kehidupan manusia.

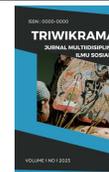


Secara umum, keluarga terdiri dari suami dan istri yang terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, serta anak-anak yang masih menjadi tanggung jawab mereka.

Secara umum, kelompok dapat diartikan sebagai sekelompok individu yang memiliki tujuan yang sama dan saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tersebut, saling mengenal, serta menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok itu. Mulyana dalam Raintung, dkk. (2021) menjelaskan bahwa kelompok adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dengan tujuan yang sama, di mana interaksi tersebut berlangsung secara relatif stabil dan memiliki suatu struktur tertentu. Sementara itu, Mardikanto dalam Raintung, dkk. (2021) kelompok tani dapat didefinisikan sebagai sekumpulan warga berkerja sebagai petani, baik usia tua maupun yang masih muda, yang terhubung secara tidak resmi dalam suatu area tertentu berdasarkan keselarasan dan kebutuhan kolektif, dan berada di bawah arahan serta pengaruh seorang petugas.

Saat ini keadaan kelompok masyarakat khususnya pada kelompok tani sawit masih belum mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah desa, petani harus berjuang dengan swadaya kelompok untuk bisa mendapatkan fasilitas seperti pupuk subsidi dan bibit yang berkualitas. Banyak anggota kelompok tani yang masih belum memiliki keterampilan, kemampuan, dan potensi yang diperlukan yang belomo ptimal saat menjalankan juga mengelola pertanian. Minimnya keilmuan di kalangan petani menyebabkan kelompok tani tidak dapat beroperasi sesuai harapan. Penyebabnya adalah oleh minimnya pelatihan dan pengembangan, bimbingan dan edukasi mengenai metode yang semestinya diterapkan oleh petani saat mengelola pertanian yang dimiliki oleh kelompok tani dengan tepat. Perhatian tersebut semestinya menjadi perhatian pemerintah desa sebagai pemerintah terkecil yang ada di daerah tersebut mengingat mayoritas penduduk berpenghasilan dari tanaman sawit, baik menjadi petani sawit atau buruh sawit. Pemberdayaan petani sawit yang diharapkan adalah melibatkan peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan dukungan manajemen yang berkelanjutan. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan dalam industri kelapa sawit. Dari latar belakang dan landasan teori tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana sebenarnya peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani sawit di Desa Lebung Lawe, Kecamatan Buay Bahuga. Penelitian ini ingin mengungkap sejauh mana peran tersebut diimplementasikan dalam bentuk dukungan pelatihan, akses sumber daya, pendampingan, dan pengembangan infrastruktur yang menunjang pengembangan kelompok tani sawit. Kedua, selain itu studi akan menentukan kendala dan tantangan hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam melaksanakan pemberdayaan kelompok tani tersebut.

Penelitian mengenai masalah yang sama telah dilakukan oleh Raintung dan rekan-rekannya (2021) dengan judul "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow." Pada penelitian tersebut Raintung, dkk. melakukan penelitian terhadap pemberdayaan petani hortikultura mencakup tanaman seperti kentang, wortel, batang bawang, cabai, jahe, sawi, dan tomat. sedangkan penelitian ini peneliti akan berfokus pada petani sawit yang ada di desa Lebung Lawe Kecamatan Way Kanan Provinsi Lampung. Perbedaan ini menegaskan konteks pertanian yang berbeda serta tantangan yang khas di masing-masing daerah, sehingga memungkinkan analisis yang lebih spesifik dan mendalam terkait peran pemerintah desa dalam pemberdayaan petani sawit. Berdasarkan teori yang sudah disampaikan diatas peneliti akan fokus terhadap pendapat teori Arif (Adhawati dalam Raintung, 2021) pemerintah memiliki peran dalam pemberdayaan yaitu : sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator dan Katalistator.



METODE

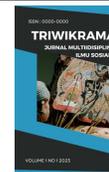
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif, yang menurut Hilal dan Alabri dalam Purwanza, dkk. (2022) didefinisikan sebagai cara untuk menggambarkan fenomena dari sudut pandang informan, mengidentifikasi berbagai realitas yang ada, serta mengembangkan pemahaman yang menyeluruh tentang suatu fenomena dalam konteks tertentu. Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini mencakup bagaimana peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani sawit di Desa Lebung Lawe, Kecamatan Buay Bahuga. Penelitian ini mengacu pada peran pemerintah yang diidentifikasi oleh Arif, yang mencakup peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator. Selain itu, studi ini akan mengeksplorasi kendala dan tantangan dialami pemerintah desa saat melaksanakan program pemberdayaan kelompok tani sawit, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program tersebut.

Partisipan penelitian akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan langsung dalam kelompok tani sawit, posisi dalam pemerintahan desa, dan pengalaman dalam program pemberdayaan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua orang pemerintah desa, satu orang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), satu orang ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), lima orang anggota kelompok tani, dan satu orang petani. Teknik pengumpulan data primer akan dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara akan dilakukan dengan berbagai informan, termasuk Kepala Desa, anggota kelompok tani sawit, petani individu, dan pihak terkait lainnya seperti penyuluh pertanian, dengan tujuan untuk mendapatkan perspektif yang beragam mengenai peran pemerintah desa dan tantangan yang dihadapi. Selain itu, peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap aktivitas pemberdayaan yang dilakukan melalui pemerintah desa, termasuk pelatihan, sosialisasi, dan interaksi antara pemerintah desa dan kelompok tani.

Data sekunder akan dikumpulkan melalui dokumentasi, yang mencakup dokumen resmi, laporan kegiatan, dan data statistik yang relevan dari pemerintah desa dan instansi terkait lainnya. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Purwanza, dkk. (2022) proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai dengan memeriksa semua data yang ada dari berbagai sumber. Data yang beragam tersebut akan dibaca secara teliti, dipelajari, dan diringkas dengan cara membuat inti dari informasi tersebut (abstraksi). Peneliti akan mendeskripsikan tema-tema utama yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dan tantangan yang dihadapi dalam pemberdayaan kelompok tani sawit. Untuk meningkatkan validitas data, triangulasi akan dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah desa Lebung Lawe adalah pemerintahan yang paling mengerti kondisi pertanian karena dapat melihat dan merasakan langsung perjuangan yang dilakukan petani untuk bisa mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Dalam hal ini pemerintah desa memiliki peran yaitu sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan katalisator. Namun demikian, peran pemerintah desa ini juga memiliki hambatan dalam pengimplementasiannya secara nyata, untuk melihat sejauh mana keterlibatan tugas pemerintah desa, peneliti merujuk pada pandangan yang diungkapkan oleh Arif (Adhawati, dalam Raintung, dkk. 2021) adalah sebagai berikut :



Peran Pemerintah sebagai Regulator

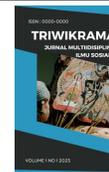
Arif (Adhwati, dalam Raintung, dkk. 2021) menjelaskan bahwa peran pemerintah sebagai regulator sangat penting dalam mengarahkan pembangunan agar seimbang. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan untuk memastikan efektivitas dan ketertiban dalam administrasi pembangunan. Di tingkat desa, pemerintah juga bertanggung jawab untuk merumuskan aturan dan program pemberdayaan kelompok tani, yang memberikan pedoman bagi masyarakat untuk mengatur kegiatan pemberdayaan di dalam kelompok tani mereka. Salah satu peran pemerintah yang paling signifikan adalah dalam pembuatan kebijakan yang berdampak luas. Melalui regulasi yang ditetapkan, sektor pertanian sangat dipengaruhi dalam upaya pengelolaan kegiatan pertanian masyarakat, yang mendorong terciptanya inovasi baru di bidang pertanian.

Dalam mendukung aktivitas pertanian masyarakat, pemerintah desa telah berkontribusi untuk penguatan kapasitas petani di Desa Lebung Lawe melalui pembentukan gabungan kelompok tani. Selain itu, mereka juga memberikan penyuluhan dan pelatihan melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk memberdayakan petani. Pembentukan gabungan kelompok tani ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam menyalurkan berbagai fasilitas atau infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan pertanian. Salah satu informan, Kepala Desa, menyatakan dalam wawancara, "Kami berusaha untuk memberikan dukungan maksimal kepada kelompok tani melalui penyuluhan dan pelatihan. Namun, kami juga menyadari bahwa masih ada tantangan dalam hal akses terhadap bantuan, terutama karena belum adanya aturan dan arahan yang jelas dari pemerintah pusat." Pernyataan ini mencerminkan realitas yang dihadapi oleh masyarakat, di mana meskipun ada upaya dari pemerintah desa untuk memberdayakan petani, tantangan dalam mendapatkan bantuan tetap menjadi hambatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan petani untuk memastikan bahwa program pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Korelasi antara teori dan temuan di lapangan terlihat dalam peran pemerintah sebagai regulator yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan sektor pertanian. Teori tentang pentingnya regulasi dalam pembangunan menekankan bahwa kebijakan yang jelas dan terarah dapat mendorong inovasi dan efektivitas dalam pengelolaan kegiatan pertanian. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah berupaya untuk memberdayakan petani melalui pembentukan gabungan kelompok tani dan penyuluhan, masih terdapat tantangan dalam akses terhadap bantuan yang disebabkan oleh kurangnya regulasi yang jelas dari pemerintah pusat. Hal ini mencerminkan bahwa teori yang ada perlu diintegrasikan dengan praktik di lapangan, di mana komunikasi yang lebih baik dan penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa program pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif. Dengan demikian, hubungan antara teori dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan petani sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

Peran Pemerintah Desa Sebagai Dinamisator

Arif (Adhwati, dalam Raintung, dkk. 2021) mengungkapkan bahwa dalam menjalankan perannya sebagai dinamisator, pemerintah desa memiliki kemampuan untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta mengajak masyarakat agar lebih peduli dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan. Namun, masyarakat menghadapi kendala saat beraktivitas sebagai anggota kelompok tani, seperti ketidakmerataan dalam pembagian bantuan yang diberikan kepada semua kelompok tani. Salah satu anggota kelompok tani, dalam wawancara, menyatakan, "Kami merasa bantuan yang kami terima tidak merata. Beberapa

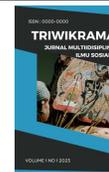


kelompok mendapatkan lebih banyak, sementara kami hampir tidak mendapatkan apa-apa." Selain itu, pemberian bibit unggul yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan desa juga berdampak negatif pada hasil produksi petani. Seorang petani lainnya menambahkan, "Bibit yang kami terima tidak cocok dengan tanah kami, sehingga hasil panen menjadi sangat minim." Di sisi lain, pemerintah juga mengalami tantangan, seperti kurangnya minat petani untuk mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan yang diselenggarakan.

Sebagai penggerak, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan kegiatan pertanian masyarakat. Pemerintah juga diharapkan untuk memperhatikan setiap keluhan dari anggota kelompok tani serta memberikan motivasi guna mengembangkan potensi yang ada di dalam kelompok tani, sekaligus mengatasi kendala-kendala yang mereka hadapi. Peran pemerintah dalam memberikan motivasi dan bimbingan menjadi sangat penting karena sensitivitas kelompok tani terhadap lingkungan mereka sendiri. Hal ini dapat mendorong kelompok tani untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan memperbaiki lingkungan. Bapak pangsur sebagai kepala desa menjelaskan dalam wawancara, "Kami berusaha untuk memberikan dukungan maksimal, tetapi kami juga perlu mendengar keluhan dan kebutuhan petani agar program kami lebih tepat sasaran." Upaya pemberdayaan ini dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas pertanian di masyarakat, dengan tujuan menyiapkan arah yang seimbang dalam penyelenggaraan pembangunan. Diharapkan, melalui upaya ini, lingkungan hidup mereka dapat diperbaiki, sehingga kelompok tani menjadi lebih memiliki kapasitas dan bisa berkompetisi di pasar.

Agar pemberdayaan dapat berhasil, pemerintah desa perlu terus berperan aktif dalam memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, serta mampu membangkitkan demokrasi dan menggerakkan semua komponen, baik di dalam maupun di luar, untuk berpartisipasi demi kesungguhan pembangunan. Mengacu pada analisis yang dilakukan peneliti, terlihat bahwa pemerintah sebagai dinamisor telah berusaha mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dengan berusaha melakukan pemberdayaan yang mendorong keberhasilan kegiatan pertanian di Desa Lebung Lawe. Upaya ini dilakukan dengan membentuk kelembagaan pertanian berupa gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan melalui rapat evaluasi anggota kelompok tani, serta memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada petani agar kegiatan pertanian dapat berjalan dengan baik. Namun, sangat disayangkan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak memenuhi harapan petani, karena bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan pembentukan kelompok tani tidak disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Akibatnya, partisipasi anggota kelompok tani dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan menjadi sangat rendah. Seperti yang diungkapkan oleh seorang petani, "Kami ingin belajar, tetapi sering kali apa yang diajarkan tidak relevan dengan kondisi kami."

Korelasi antara teori dan temuan di lapangan terlihat dalam peran pemerintah sebagai dinamisor yang diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Teori tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya bimbingan, motivasi, dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk mencapai hasil yang diinginkan. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa telah berusaha untuk memberikan dukungan melalui pembentukan gabungan kelompok tani dan penyuluhan, tantangan seperti ketidakmerataan dalam pembagian bantuan dan kurangnya relevansi materi pelatihan dengan kondisi petani menghambat efektivitas program tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa teori yang ada perlu diintegrasikan dengan praktik di lapangan, di mana pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan kondisi petani sangat penting untuk merancang program yang tepat sasaran. Dengan demikian, hubungan antara teori dan temuan



di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan pemberdayaan petani sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan pemerintah dan respons masyarakat terhadap program yang ada.

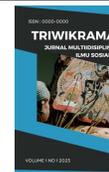
Peran Pemerintah Desa Sebagai Fasilitator

Arif (Adhwati, dalam Raintung, dkk. 2021) menyatakan bahwa dalam kapasitasnya sebagai fasilitator, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui berbagai program pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan. Selain itu, pemerintah desa juga berperan dalam aspek pendanaan dengan menyediakan bantuan modal yang diperlukan oleh masyarakat. Di Desa Lebung Lawe, pemerintah telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah daerah kepada kelompok tani, yang mencakup penyediaan alat pertanian, benih jagung, dan pupuk bersubsidi. Namun, meskipun bantuan tersebut telah diberikan, masih terdapat kekurangan dalam memenuhi kebutuhan semua anggota kelompok tani. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerja sama yang efektif antara pemerintah dan petani dalam pelaksanaan kegiatan pertanian. Salah satu anggota kelompok tani, dalam wawancara, mengungkapkan, "Kami menerima beberapa bantuan, tetapi tidak semua anggota kelompok kami mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ini menciptakan ketidakmerataan yang membuat beberapa dari kami kesulitan."

Sebagai fasilitator, peran pemerintah sangat krusial dalam mendukung kegiatan pembangunan di tingkat desa. Fasilitas yang disediakan tidak hanya perlu berfokus pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan prasarana yang ada. Ketersediaan pupuk yang kurang, misalnya, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kelancaran dan keberhasilan kegiatan pertanian. Seorang petani lainnya menambahkan, "Masalah pupuk sangat mengganggu kami. Kadang-kadang, kami tidak bisa mendapatkan pupuk yang cukup untuk lahan kami, dan itu sangat mempengaruhi hasil panen." Masalah pupuk di Indonesia merupakan isu yang sangat relevan, karena berkaitan langsung dengan kelangsungan dan kebutuhan lahan pertanian

Selain itu, pemerintah juga harus secara berkelanjutan memberikan bimbingan teknis dan non-teknis kepada kelompok tani. Bimbingan ini bertujuan untuk mendorong dan memberdayakan petani agar mereka mampu merencanakan, membangun, dan mengelola sarana serta prasarana pemberdayaan secara swadaya. Kepala Desa menjelaskan ketika wawancara, "Kami berusaha untuk memberikan bimbingan yang diperlukan, tetapi kami juga perlu mendengar masukan dari petani agar program kami lebih tepat sasaran." Dengan demikian, kelompok tani diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pendukung lainnya dengan kemandirian, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan keberhasilan usaha pertanian mereka.

Korelasi antara teori dan temuan di lapangan terlihat jelas dalam konteks ini. Teori mengenai fungsi pemerintah sebagai fasilitator pada penguatan masyarakat, yang menekankan pentingnya pendampingan dan penyediaan sumber daya, sejalan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun bantuan telah diberikan, masih ada tantangan dalam implementasinya. Ketidakmerataan dalam distribusi bantuan dan masalah ketersediaan pupuk mencerminkan bahwa teori yang ada perlu disesuaikan dengan realitas di lapangan. Selain itu, kebutuhan akan bimbingan teknis dan non-teknis yang berkelanjutan menunjukkan bahwa teori tentang pemberdayaan petani harus mencakup aspek partisipasi aktif dari petani dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara teori dan temuan di lapangan adalah dinamis dan saling mempengaruhi, yang memungkinkan pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mendukung kelompok tani.



Peran Pemerintah Desa Sebagai Katalisator

Arif (Adhwati, dalam Raintung, dkk. 2021) menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki peran penting sebagai katalisator dalam mempercepat pengembangan potensi yang ada di desa. Fungsi ini berkaitan erat dengan kemampuan pemerintah desa untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mendorong percepatan pembangunan serta mengkoordinasikan upaya-upaya yang diperlukan. Dalam wawancara, seorang Kepala Desa menyatakan, "Kami berusaha untuk menjadi penggerak dalam pembangunan desa. Kami perlu mengidentifikasi potensi yang ada dan mengajak semua pihak untuk berkontribusi." Untuk mengoptimalkan peran ini, pemerintah desa perlu aktif mendorong partisipasi dari berbagai pihak yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam pembangunan sarana dan prasarana, termasuk sektor swasta dan masyarakat yang berswadaya.

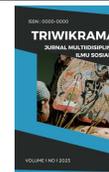
Penting bagi pemerintah desa untuk membangun dan memperkuat koordinasi serta kerja sama yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Seorang anggota kelompok tani menambahkan, "Kami merasa lebih termotivasi ketika pemerintah melibatkan kami dalam setiap tahap pembangunan. Ketika kami diajak berdiskusi, kami bisa memberikan masukan yang relevan." Hal ini akan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses pembangunan dan dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Selain itu, ketersediaan sikap pemerintah desa untuk menyediakan dana yang diperlukan untuk kelompok tani juga menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan, karena akses terhadap modal dapat mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan dan pengembangan ekonomi di tingkat desa. Seorang petani menjelaskan, "Tanpa modal yang cukup, kami sulit untuk mengembangkan usaha tani kami. Kami berharap pemerintah bisa membantu dalam hal ini." Dengan langkah-langkah ini, diharapkan potensi desa dapat dimaksimalkan dan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Korelasi antara teori dan temuan di lapangan terlihat dalam peran pemerintah desa sebagai katalisator dalam pembangunan. Teori yang menyatakan bahwa pemerintah desa wajib bisa mengidentifikasi potensi dan mendukung keterlibatan masyarakat sejalan dengan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan meningkatkan motivasi dan kontribusi mereka. Pernyataan anggota kelompok tani yang merasa lebih termotivasi ketika dilibatkan dalam diskusi mencerminkan pentingnya partisipasi aktif, yang merupakan salah satu prinsip dalam teori pembangunan partisipatif. Selain itu, kebutuhan akan modal yang diungkapkan oleh petani menunjukkan bahwa teori tentang akses terhadap sumber daya ekonomi sangat relevan dalam konteks ini. Dengan demikian, hubungan antara teori dan temuan di lapangan memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan desa sangat bergantung pada kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta penyediaan sumber daya yang memadai.

Implementasi Dukungan dan Pembangunan Infrastruktur

Desa Lebung Lawe, yang terletak di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan, telah melaksanakan berbagai program implementasi dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemberdayaan kelompok tani sawit. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Salah satu langkah penting yang telah diambil adalah perbaikan jalan akses menuju area perkebunan. Pemerintah desa telah melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan desa dengan kebun sawit. Perbaikan ini sangat krusial, mengingat jalan yang baik akan memudahkan petani dalam mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Bapak Joko, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), menyatakan, "Dengan adanya perbaikan jalan, kami kini lebih mudah membawa hasil panen ke pasar. Ini sangat membantu kami dalam



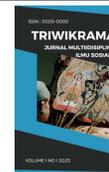
meningkatkan pendapatan." Selain itu, pemerintah desa juga telah melaksanakan perbaikan sistem drainase di area pertanian. Pembangunan drainase yang baik sangat penting untuk mengatasi masalah genangan air yang dapat merusak tanaman. Dengan adanya drainase yang lebih baik, air hujan dapat mengalir dengan lancar, sehingga mengurangi risiko banjir dan meningkatkan kesehatan tanah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hasil panen petani sawit di desa. Pemerintah desa juga berupaya untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya pertanian dengan menyediakan fasilitas penyimpanan hasil panen. Fasilitas ini dirancang untuk menjaga kualitas hasil pertanian sebelum dijual, sehingga petani dapat memaksimalkan keuntungan mereka. Dengan adanya fasilitas penyimpanan yang memadai, petani tidak perlu terburu-buru menjual hasil panen mereka, yang sering kali mengakibatkan harga yang lebih rendah. Dalam rangka mendukung pertanian berkelanjutan, pemerintah desa juga telah mengadakan pelatihan bagi petani mengenai teknik budidaya yang baik dan penggunaan teknologi pertanian modern. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang praktik pertanian yang efisien dan ramah lingkungan. Seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) menjelaskan, "Kami berusaha memberikan pelatihan yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan petani. Dengan pengetahuan yang lebih baik, diharapkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka."

Secara keseluruhan, implementasi dan pembangunan infrastruktur di Desa Lebung Lawe menunjukkan komitmen pemerintah desa dalam mendukung pemberdayaan kelompok tani sawit. Melalui perbaikan jalan, drainase, dan fasilitas penyimpanan, serta pelatihan bagi petani, diharapkan desa ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Hambatan dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Desa Lebung Lawe, yang terletak di Kecamatan Buay Bahuga, Provinsi Lampung, memiliki potensi besar dalam pengembangan kelompok tani sawit. Meskipun pemerintah desa telah melaksanakan berbagai program implementasi dan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan akses menuju area perkebunan dan peningkatan sistem drainase, masih terdapat beberapa hambatan yang menghalangi upaya pemberdayaan yang efektif.

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan petani. Banyak petani di Desa Lebung Lawe yang masih menggunakan metode pertanian tradisional dan kurang memahami praktik pertanian modern. Hal ini mengakibatkan rendahnya produktivitas dan kualitas hasil panen. Bapak Mustofa, Aparat Desa, mengungkapkan, "Banyak petani di sini yang belum memahami cara bertani yang baik. Mereka masih menggunakan cara tradisional yang tidak efisien." Keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian juga menjadi masalah yang signifikan. Meskipun pemerintah desa telah mengadakan pelatihan bagi petani mengenai teknik budidaya yang baik dan penggunaan teknologi pertanian modern, petani masih mengalami kesulitan dalam mengakses teknologi tersebut. Bapak Surya, seorang Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), menambahkan, "Kami sangat membutuhkan penyuluh pertanian yang lebih banyak. Tanpa mereka, petani sulit untuk mendapatkan informasi tentang teknologi baru." Infrastruktur yang belum memadai di Desa Lebung Lawe juga menjadi penghambat. Meskipun telah dilakukan perbaikan jalan akses dan pembangunan sistem drainase, jalan yang rusak dan jaringan irigasi yang buruk masih menghambat distribusi hasil panen dan ketersediaan air untuk pertanian. Saat ini, petani lebih mengandalkan sumber air tadah hujan. Bapak Joko, Ketua Gapoktan, mengeluhkan, "Jalan menuju kebun kami sangat rusak. Saat hujan, kami kesulitan untuk membawa hasil panen."



Koordinasi yang lemah antara pemangku kepentingan juga menjadi masalah. Meskipun ada upaya dari pemerintah desa untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi antara pemerintah desa, dinas pertanian, dan lembaga lain masih perlu ditingkatkan. Kurangnya forum komunikasi yang teratur menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik, sehingga program-program yang dijalankan tidak saling mendukung. Bapak Suwito, seorang anggota kelompok tani, mengungkapkan, "Sering kali kami tidak tahu tentang program yang ada. Komunikasi antara pemerintah dan petani perlu diperbaiki." Terakhir, distribusi sumber daya yang tidak merata menjadi hambatan yang signifikan. Meskipun pemerintah desa telah memberikan bantuan berupa alat pertanian, benih, dan pupuk, distribusi sumber daya ini masih belum merata. Beberapa anggota kelompok tani mungkin tidak mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan tersebut.

Secara keseluruhan, analisis hambatan pemberdayaan kelompok tani di Desa Lebung Lawe menunjukkan bahwa meskipun terdapat potensi yang besar dan berbagai upaya implementasi yang telah dilakukan, tantangan seperti kurangnya pengetahuan, infrastruktur yang tidak memadai, minimnya anggaran, dan koordinasi yang lemah masih menghambat upaya pemberdayaan. Kutipan wawancara dari informan memberikan gambaran realistis tentang kondisi yang dihadapi di lapangan. Untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan, perlu ada upaya yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi dari semua pihak terkait, serta peningkatan akses terhadap sumber daya dan teknologi yang diperlukan oleh petani.

Kesimpulan dan Saran

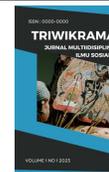
Kesimpulan

Studi ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa memainkan peran yang sangat penting dalam pemberdayaan kelompok tani sawit di Desa Lebung Lawe, Kecamatan Buay Bahuga. Melalui fungsi sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator, pemerintah desa berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai regulator, pemerintah desa telah merumuskan berbagai peraturan dan program yang memberikan pedoman bagi masyarakat dalam mengelola kegiatan pertanian. Meskipun ada upaya untuk menciptakan regulasi yang efektif, tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya aturan yang jelas dan arahan yang tepat, mengakibatkan ketidakpastian di kalangan petani mengenai akses terhadap bantuan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan petani untuk memastikan bahwa program-program yang ada dapat diakses dengan mudah dan efektif.

Dalam perannya sebagai dinamisator, pemerintah desa berusaha mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan. Meskipun telah diadakan berbagai forum dan pertemuan, ketidakmerataan dalam pembagian bantuan dan kurangnya minat petani untuk mengikuti sosialisasi dan pelatihan menjadi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan strategi komunikasi dan penyuluhan agar semua petani merasa terlibat dan mendapatkan manfaat dari program yang ada.

Sebagai fasilitator, pemerintah desa telah menyalurkan bantuan berupa alat pertanian dan pupuk bersubsidi. Namun, kerja sama yang kurang baik antara pemerintah dan petani menyebabkan bantuan tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan spesifik anggota kelompok tani. Untuk meningkatkan efektivitas bantuan, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam mengenai kebutuhan petani dan penyesuaian dalam distribusi bantuan agar lebih tepat sasaran.



Pemerintah desa juga telah melaksanakan berbagai program implementasi dan pembangunan infrastruktur yang signifikan, seperti perbaikan jalan akses menuju area perkebunan dan peningkatan sistem drainase. Perbaikan jalan akses sangat penting untuk memudahkan petani dalam mengangkut hasil panen mereka ke pasar, sementara pembangunan drainase yang baik membantu mengurangi risiko genangan air yang dapat merusak tanaman. Dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, diharapkan produktivitas pertanian dapat meningkat, dan petani dapat lebih mudah mengakses sumber daya yang diperlukan.

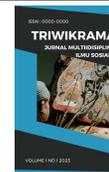
Peran pemerintah desa sebagai katalisator juga sangat penting dalam mempercepat pengembangan potensi desa. Dengan mendorong partisipasi dari sektor swasta dan masyarakat berswadaya, pemerintah dapat menciptakan kemitraan yang saling menguntungkan. Dalam menyediakan modal bagi kelompok tani, pemerintah menunjukkan kesiapan menjadi aspek krusial yang perlu diperhatikan, karena akses terhadap modal dapat mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan.

Secara keseluruhan, meskipun pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan kelompok tani sawit melalui pembangunan infrastruktur dan program-program yang ada, tantangan yang ada, seperti kurangnya pengetahuan di kalangan petani, infrastruktur yang tidak memadai, dan koordinasi yang lemah antara pemangku kepentingan, masih menghambat efektivitas program pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif, diharapkan pemberdayaan kelompok tani sawit di Desa Lebung Lawe dapat lebih efektif, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di desa.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas pemberdayaan kelompok tani sawit di Desa Lebung Lawe. Pertama, peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan sangat penting, di mana disarankan untuk membentuk forum komunikasi yang teratur antara pemerintah desa, petani, dan pemangku kepentingan lainnya. Forum ini akan berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi, mendiskusikan program yang ada, serta mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh petani. Selanjutnya, program pelatihan dan penyuluhan yang intensif perlu ditingkatkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang praktik pertanian modern dan teknologi yang dapat meningkatkan hasil panen. Penambahan jumlah penyuluh pertanian yang terlatih dan berpengalaman juga sangat penting untuk memberikan bimbingan yang lebih intensif kepada petani.

Perbaikan infrastruktur pertanian, seperti jalan akses dan jaringan irigasi, harus menjadi prioritas utama, karena infrastruktur yang baik akan memudahkan distribusi hasil panen dan memastikan ketersediaan air untuk pertanian, sehingga meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha tani. Selain itu, pemerintah desa harus memastikan bahwa distribusi sumber daya, seperti pupuk, alat pertanian, dan benih, dilakukan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan petani. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi petani dalam program pemberdayaan dan memastikan bahwa semua anggota kelompok tani mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan. Mendorong penggunaan teknologi pertanian modern juga menjadi langkah yang perlu diambil, di mana pemerintah desa dapat bekerja sama dengan lembaga penelitian dan sektor swasta untuk menyediakan akses terhadap teknologi terbaru, seperti alat pertanian canggih dan sistem irigasi pintar.



Terakhir, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program pemberdayaan yang dilaksanakan. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah desa dapat mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pemberdayaan kelompok tani sawit di Desa Lebung Lawe dapat lebih efektif, berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. R., Noer, S., & Hudalloh, H. (2023). *Peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam kinerja kelompok tani: Studi kasus Desa Kedungpari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang*. PANOPTIKON: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(1), 43-53.
- Amruddin, D., Purwanza, S. W., dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. CV. Media Sains Indonesia.
- Irawan, B., & Sari, R. (2021). *Pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan pertanian berkelanjutan: Studi kasus di Sumatera Selatan*. Jakarta: Penerbit Agro Media.
- Lardi, S. (2022). *Budidaya tanaman kelapa sawit: Buku ajar*. PT Dewangga Energi Internasional.
- Liwu, A. S., & Sasmito, C. (2019). *Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani: Studi kasus di Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(4), 228-233.
- Nurjannah, A., & Revida, E. (2024). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang*. SAJJANA: Public Administration Review, 2(1), 26-30.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). *Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Governance, 1(2), 1-10.
- Sebayang, I. M. M., Maweikere, A. J., dkk. (2024). *Peran pemerintah desa dalam kelompok tani Sombor Wanua Talumengan di Kelurahan Kakaskasen Tiga Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon*. Agrisosisioekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian, 20(1), 191-202.
- Suswadi, D. I. (2022). *Pemberdayaan petani kecil melalui pengembangan pertanian berkelanjutan*. Boyolali: Prima Swastika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244*.
- Yunus, S., & Fadli, S. (2017). *Model pemberdayaan masyarakat terpadu*. Bandar Publishing.